

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi yang kurang baik (Jonathan, 2012). Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang (Suharto, 2015)

Indonesia adalah negara yang masih menghadapi problema kemiskinan akut. Media Indonesia menyajikan hasil survei terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telepon enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar). Responden ditanya sebagaimana pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini, apakah dirasakan semakin berat atau ringan. Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21 persen responden merasakan sama saja; dan hanya 6 persen yang merasakan semakin ringan. Dengan demikian, berdasarkan garis kemiskinan (*poverty line*) rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakikatnya merujuk pada konsep kemampuan dasar manusia, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia

untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih diragukan. Dengan kata lain, hidup belum berkecukupan, masyarakat Indonesia masih belum bisa terbebas dari lilitan kemiskinan (Edi Suharto, 2014). Realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk kurang lebih berjumlah 237 juta penduduk masih terlampau banyak penduduk Indonesia yang hidup dibawah kondisi miskin (Bahjatulloh, 2016).

Menurut BAPPENAS indikator utama kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat sebagai berikut: 1.) Kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak, 2.) Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, 3.) Kurangnya kemampuan membaca dan menulis, 4.) Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, 5.) Kerentanan jaminan dan kesejahteraan hidup, 6.) Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, 7.) Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah, 8.) Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dari sisi makanan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakara Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan (Amelia, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Ponorogo 2021, Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Ponorogo pada bulan Maret 2021 mencapai 89,94 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 3,21 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 86,74 ribu jiwa. Lalu Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo juga mengalami peningkatan dari 9,95 persen pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 10,26 persen pada bulan Maret

2021. Kemudian Garis Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada bulan Maret 2021 sebesar Rp341.090,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp14.885,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,56 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp326.205,00. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapa pun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Sedangkan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,- per kg dititik distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, melalui

mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut e-warong. Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai.

Jumlah total penerima Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tambahan di 16 Desa Wilayah Kecamatan Sambit sebanyak : 921 KPM, diterimakan @Rp 600.000,- dengan jumlah total uang yang disalurkan Rp. 552.600.000,-. Adapun jumlah penyaluran BPNT di masing-masing Desa yaitu Desa Bancangan : 50 KPM, Desa Bedingin : 47 KPM, Desa Bangsalan : 33 KPM, Desa Besuki : 32 KPM, Desa Bulu : 29 KPM, Desa Campurejo : 69 KPM, Desa Campursari : 34 KPM, Desa Kemuning : 23 KPM, Desa Wringinanom : 123 KPM, Desa Wilangan : 29 KPM, Desa Gajah : 148 KPM, Desa Jrasah : 64 KPM, Desa Sambit : 35 KPM, Desa Ngadisanan : 53 KPM, Desa Maguwan : 73 KPM, Desa Nglewan : 79 KPM,

Proses pemberian Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Nglewan untuk mekanisme penerimaan penerima BPNT sesuai jadwal yang sudah ditentukan datang ke kantor Pos Kecamatan Sambit dengan membawa surat

undangan pengambilan dana dan membawa KTP. Serta menunjukkan bukti telah melakukan Vaksinasi. Jika penerima belum melaksanakan Vaksin maka akan di sediakan tempat Vaksin di sekitar lokasi penyaluran BPNT dan agar melampirkan surat keterangan dari Puskesmas setempat.

Selanjutnya penerima bantuan menunggu antrian untuk dilayani oleh petugas dari Kantor Pos Kecamatan Sambit. Penerima BPNT menerima dana tunai BNPT sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) merupakan penerimaan untuk 3 Bulan (Januari-maret 2022) @ RP. 200.000/bulan diterimakan sekaligus 3 bulan dimuka. Jika pengambilan diwakilkan KPM yang meninggal dunia, syaratnya bantuan akan diserahkan kepada ahli waris dalam satu KK, Diambil oleh anggota keluarga dalam satu KK, Menunjukkan KTP Asli. Jika yg mewakili pengambilan berbeda KK, maka wajib menunjukkan KK KPM yang bersangkutan dan KK pengambil Membuat surat kuasa (terlampir), membawa foto copy KTP & KK. Untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di wilayah kecamatan Sambit.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sementara, menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Ponorogo memiliki dampak positif hal ini terbukti dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangat membantu meringankan beban kebutuhan hidup keluarga bagi penerima bantuan. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa proses BPNT saat ini mudah dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM sehingga memberikan manfaat positif. Akan tetapi dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Ponorogo masih terdapat ketepatan sasaran yang masih kurang tepat, keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan masih ada yang belum terdata. Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana peningkatan ekonomi keluarga miskin di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui peningkatan ekonomi keluarga miskin di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

3. Manfaat Teoritis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam kaitannya implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

4. Manfaat Praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca, dan memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi penulis, serta bagi pemerintah khususnya pada bidang pelaksanaan program BPNT untuk menjadi bahan masukan pada perbaikan pelaksanaan implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

E. PENEKASAN ISTILAH

Penegasan istilah memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai konsep yang akan digunakan sebagai perspektif dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu peneliti mendefinisikan beberapa konsep yang berkaitan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan Menurut Gordon menyatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Mulyadi, 2015).

2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

(<https://pusdatin.kemensos.go.id/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt>)

3. Kesejahteraan

kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan; Kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi, dan Ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Fahrudin (2012)

4. Masyarakat Desa

Masyarakat dan pedesaan atau desa, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan

terlebih dahulu kata perkata. Misalnya, Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, (Koentjaraningrat, 2022).

F. LANDASAN TEORI

1. Implementasi

Berdasarkan KBBI online Implementasi memiliki arti Pelaksanaan dan Penerapan. Sedangkan Menurut Gordon (Mulyadi, 2015) menyatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi sering dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas yang mendefinisikan implementasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah tindakan, aktivitas, suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), proses tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87).

Model Implementasi Kebijakan Publik yang selanjutnya dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya).

Secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik teori Edward III yang cocok seringkali dikaitkan dengan proses administratif di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

2. Tahapan dalam Implementasi

Untuk memperjelas persoalan proses Implementasi harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya, yaitu:

- 1) Output- output kebijakan (keputusan- keputusan) dari badan-badanpelaksana.
- 2) kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
- 3) Dampak nyata keputusan- keputusan badan-badan pelaksana.
- 4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
- 5) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan- perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan/ isinya.

Semua tahapan diatas seringkali digabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun, di sini terdapat dua proses yang terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauh mana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan- tujuan program, maka yang penting diperhatikan hanya tiga tahap yang disebutkan pertama. (Abdul, 2014).

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Meter, Erward III, Grindle, dan Mazmanian dan Sabatier. Model Erward mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure*. (Widodo, 2006)

Pentingnya implementasi kebijakan oleh Odoji, yakni dimana pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan dan kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika

tidak diimplementasikan (Nugroho & Setiyono, 2015)

Implementasi yang diperkenalkan oleh pakar kebijakan publik seperti model klasik yang dinyatakan oleh Van Meter Van Horn di atas kita mengetahui bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeksekusi tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaannya, meskipun demikian implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat dilakukan karena kadang hal-hal yang tidak dijumpai dalam suatu konsep bisa terjadi di lapangan dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjaditujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumberdaya

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan.

a) Sumber Daya Manusia

Edward III menegaskan bahwa sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahliannya). Dengan

demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sasaran yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d) Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Informasi yang dimaksud yaitu informasi relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

3. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

a) Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- 1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam

memenuhi kebutuhan pangan.

- 5) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

b) Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 3) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional NonTunai (GNNT).
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras.

c) Tahap Registrasi/Distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)

- 1) Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan tentang rekening secara kolektif berdasarkan data yang ditentukan oleh kementerian sosial.
- 2) Bank Penyalur dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota dan para pendamping sosial akan melaksanakan distribusi KKS dan kelengkapan kepada KPM yang telah dibukakan rekening.
- 3) KPM akan mendapatkan informasi terkait terdaftarnya dalam program BPNT dan proses registrasi KKS.
- 4) Pada proses registrasi KKS, calon KPM wajib membawa kartu identitas diri untuk melakukan pencocokan dokumen sebelum KKS dibagikan.
- 5) Saat melakukan registrasi, Bank penyalur akan memberikan informasi kepada KPM terkait lokasi E-Warong yang dapat digunakan untuk pengecekan saldo KKS di E-Warong.
- 6) Apabila diketahui data KPM tidak sesuai (kesalahan nama, NIK, atau alat) saat registrasi maka KPM harus menyertakan data kembali

seperti surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional bertujuan untuk mengoperasionalkan penelitian yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan untuk mendapatkan hasil atau output pada penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

3. Implementasi Program BPNT merupakan fokus utama dalam penelitian ini, peneliti akan memaksimalkan pemahaman dan pengumpulan data untuk di analisa dengan cermat agar sesuai dengan tujuan penelitian
 - a) Analisis potensi, dan masalah,
 - b) Pelaksanaan program bantuan
 - c) Pengendalian
proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan
 - d) Evaluasi
proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Nglewan
 - a) Faktor Pendukung implementasi BPNT (komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi)
 - b) Faktor penghambat implementasi BPNT (sumber daya manusia)
5. Peningkatan Ekonomi Keluarga.
Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil dari unit ekonomi yang memiliki peran sebagai upaya membebaskan manusia pada tingkat kemiskinan. Dalam masyarakat, ekonomi keluarga diklasifikasikan dalam tiga lapisan ekonomi, yaitu:

a) ekonomi mampu;

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan juga lingkungannya.

b) ekonomi sedang;

Status yang baik terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya

c) ekonomi keluarga tidak mampu.

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman masyarakat yang tertinggal

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran. (Sugiyono, 2015). Pada dasarnya metode penelitian berfungsi untuk membantu peneliti dalam memberikan suatu penafsiran terhadap suatu hal yang bersifat nyata dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang telah ada dan yang berlaku. Selain itu, penelitian deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggerakkan, melukiskan kekayaan subyek, obyek penelitian (individu, lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. (Moleong, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di laksanakan di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dikarenakan belum ada yang membahas penelitian tentang program Bantuan Pangan Non Tunai atau BNPT.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Narasumber atau informan yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu kepala desa, pendamping program bantuan pangan non-tunaiserta masyarakat penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menunjukkan ketepatan dan kekayaan data dan informasi yang diperoleh. Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut telah digali dari beragam sumber data, dan jenis sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

1) Kepala Desa Nglewan Sambit	= 1 orang
2) Penanggung Jawab BPNT di Desa Nglewan	= 1 orang
3) Masyarakat penerima BPNT	= 3 orang
Jumlah	= 5 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2015). Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Dalam observasi penelitian ini, peneliti tidak termasuk dalam anggota obyek penelitian, peneliti hanya sebagai pengamat untuk memperoleh data lengkap, pengamatan ini dilakukan pada kegiatan implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara bebas tanpa terikat oleh pertanyaan tertulis tetapi masih dalam cakupan pembahasan penelitian. (Sugiyono, 2015) Hal ini dimaksud agar wawancara lebih terbuka. Wawancara ini sesuai dengan perumusan masalah yang diambil, maka penulis mengadakan wawancara yang mendalam dengan narasumber. Narasumber dalam wawancara ini yaitu 1.) kepala desa, 2.) pendamping program bantuan pangan non-tunai, 3.) penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti maupun data yang diperoleh di lapangan dan mendapat gambaran subyek melalui suatu media tertulis. Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian (Ghony & Almanshur, 2012). Teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data tertulis yang telah tersedia. Dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam sebuah penelitian dokumen menjadi penting karena melalui dokumen peneliti dapat menimba pengetahuan bila dianalisis dengan cermat.

5. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2017) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaksi yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/ verifikasi.

Milles dan Huberman mengemukakan tahap kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan (Miles et al., 2014).

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Reduksi Data

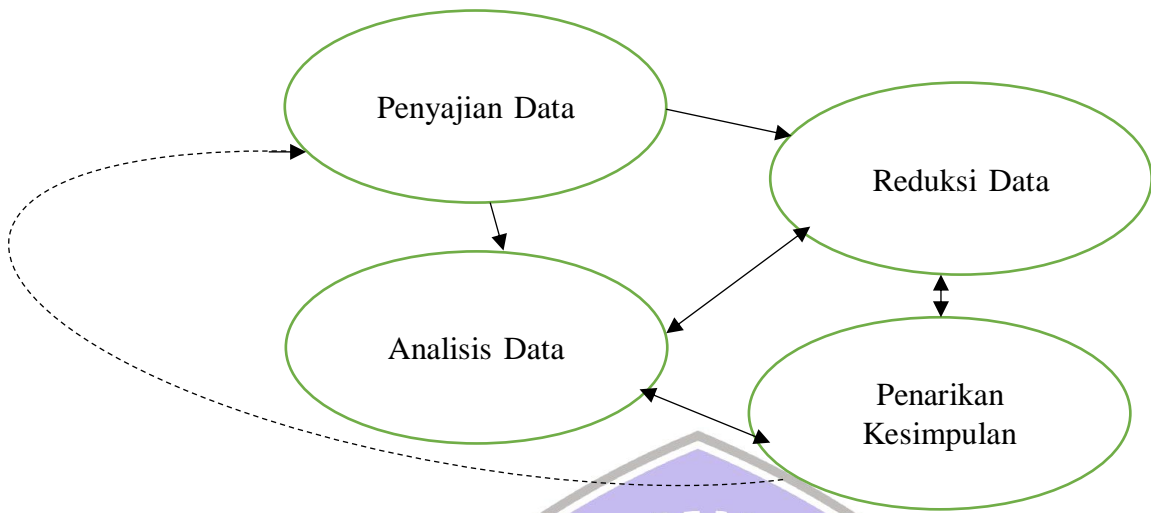
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Setelah data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik dan sejenisnya. Dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelapsehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal, interaktif, hipotesis atau teori.



Gambar 3.1

Komponen Analisis Data : Model Interaktif , Miles, M. B., Huberman, A.

M., & Saldaña, J. (2014



